



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Alamat : Jln. Banda Aceh – Medan Komplek Perkantoran Cot Trieng No 9 Telp. (0653) 51231, Fax. (0653) 51231, Kode Pos 24186 Meureudu

Risalah : Rapat Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya terhadap Pembahasan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023.

Hari : Senin sore
Tanggal : 21 November 2022
Waktu : 14.00 s/d selesai
Tempat : Gedung DPRK Pidie Jaya (Ruang Banggar)
Koordinator :
Unsur Pimpinan : A.Kadir Jailani
Hasan Basri, ST.MM
H. Syahrul Nurfa, SH

Sekretaris Banggar : M. Nasir, S.Pd (Sekretaris DPRK)
Kabag Hukum &
Persidangan : Yurliana, SH. MH
Notulen Rapat :

Hadir Anggota : 1. Saiful Anwar
2. Saifullah, SH
3. Edi Sahputra
4. Abdul Muthalib
5. Tgk. H. Yusri Abdullah
6. Fakhurrazi, S.Pd.I
7. Muslim M. Adam
8. Mahlil
9. Munawar
10. T. Zulfan

Tidak Hadir : -

Turut Hadir : Sekda, Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor

ACARA

Rapat Membahas masalah : Rapat Badan Anggaran DPRK Pidie Jaya terhadap Pembahasan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023.

KESIMPULAN

Pembukaan Rapat Oleh Ketua DPRK Pidie Jaya Rapat dilanjutkan dengan agenda Pembahasan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023.

SEKRETARIS DPRK PIDIE JAYA

M. Nasir, S.Pd.

Pembina Utama Muda/NIP. 19650413 198703 1 003

**NOTULENSI
RAPAT BADAN ANGGARAN DPRK PIDIE JAYA
COT TRIENG, 21 November 2022**

-
- A. Kadir Jailani** : Assalamu'alaikum Wr. Wb. Skor dicabut. Rapat dilanjutkan. Perjanjian yang dibahas akan datang DAU, Otsus, Dana Kecamatan, Kepala BPKK di persilahkan.
- Hasan Basri** : DID kesaya tidak masuk, sharing ke Belanja.
- BPKK** : Saya ulangi ini format yang diminta oleh pak Hasan, cuma ini beda daerah beda format. Saya ulangi, Pendapatan Pidie Jaya tahun 2023. RP. 898.370.441.245. Kemudian Pendapatan ini terdiri dari PAD kita 113.628.081.955, Penggunaan yang kita pilah PAD ini 19.946.353 adalah PAD Murni, PAD kita posting ke Dana Desa. 90 Milyar kembali ke dana JKN/BLUD.
- Hasan Basri** : Alokasi dana gampong kemana?
- BPKK** : DBH dari DAU, sisa kita ambil dari PAD
- A Kadir Jailani** : apakah sudah jelas?
- BPKK** : Penggunaan dana transfer dari Perimbangan, Dana Transfer Umum 428.019.952.000 itu total DAU dan DBH, untuk DBH/Bagi Hasil 8.750.241.000 itu untuk dana DBH. Dan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) 419.269.711.000. Ini kita gunakan platfon kita tambahkan event wajib di tahun 2023, untuk Parpol Pembayaran DOKA. Ada yang tidak terbayar. Hibah Khusus Polres, ada yang dilakukan tapi tidak terbayarkan. DBH bea cukai harus kita posting. Sementara dari DAU belanja gaji dan tunjangan, POKIR 27 M, belanja tidak terduga, program pimpinan, harus kita gambarkan.
- Hasan Basri** : Belanja tidak terduga asumsi saya, dengan kondisi keuangan real kita, sangat-sangat tidak cukup.
- BPKK** : Kita gambarkan lagi biaya gaji yang tadi, masih ada TPP sama belnaja kita gabungkan. Ada catatan bisa dilihat. Ini lah angka 14. 40 M, baru memungkinkan kita buat 2 jalur

Hasan Basri : jika buat 2 jalur, asumsi kita dari Sp3 dari sp beracan. 2 meter asumsi kita tidak terbangun jika 5 M. Berapa bisa kita terbayarkan. Berapa tahun sudah kita wanti2 utnuk plotkan anggaran.

A kadir : Berapa orang yang punya tanah, itu yang kita bayar.

Kadis BPKK : penempatan 5 M ini biar sekda yang jawab. Untuk penyertaan Modal Bank aceh untuk PDAM, untuk Bank Aceh 1 M dan untuk PDAM 100 juta, listrik seluruh kantor, mukim, paskibraka, termasuk kita tempatkan event PORA dari informasi KONI. Hibah hibah yang lain. Kemudian dibutuhkan latsar CPNS dananya 1.5, JKK 1 M, JKM 700.000.000,- POKIR 1,3 M, saya kira ini kebutuhan yang digunakan dari dan transfer pusat, DBH. Dana DAK fisik 50 M, dan dana transfer khusus non fisik 82 M, dana insetif daerah (DID) 11 M , digunakan untuk menunjang sekretariat kabupaten. Untuk kegiatan sekdakab 4 M.

Akadir : Dan untuk menunjang kegiatan sekdakab itu dikeluarkan. Karena persetujuannya di DPR udah dikeluarkan.

Hasan Basri : saya setuju-setuju saja jika dana penunjang sekdakab dihapuskan dan jika secretariat di dprk hapuskan saja.

Akadir : Dan dana untuk menunjang kegiatan sekdakab itu dikatakan bersama dihapuskan saja.

Muslem : Dana untuk menunjang kegiatan sekdakab ini kita bahas kembali nanti, jangan diambil keputusan dulu mengenai dana yang harus dikeluarkan untuk penunjang kegiatan sekdakab.

Saifullah : mengenai dan gedung serbaguna, Karena keterbatasan dana. Untuk dana gedung serbaguna ini Kita hilangkan saja dan di alihkan ke pemeliharaan Jembatan layang, seperti lampu, jalan dan lain-lain, intinya jembatan layang di sempurnakan. Atau untuk pemeliharaan bangunan lainnya.

- Hasan Basri** : Jika cukup 3 M kita plotkan, karena ada penelitian juga terhadap bangunan tersebut. Apakah layak baru diplotkan anggaran kembali. Karena bupati ini tidak melanjutkan kembali. Bupati lain yang akan lanjutan. Itu Perlu adanya Dokumen dan berapa butuh dana untuk pembangunan gedung serbaguna hingga layak pakai, dan apakah gedung itu memiliki fungsional. Itu harus di perhatikan dan di pertimbangkan, karena di khawatirkan pembangunan gedung serbaguna ini tahun 2024 tidak dilanjutkan lagi. Di karenakan pergantian bupati. Lebih baik cenderung ke pembangunan jembatan layang disempurnakan saja.
- Akadir** : Itu saran jika wajib diberikan, menurut dokumen.
- BPKK** : Kondisi real kita alokasi dana 3 M akan dipaparkan oleh Pak Bahroom. Mohon Pak Bahroom di paparkan.
- Bahroom** : Ass. Penghormatan. Terkait masalah bangunan serba guna. Bersama muspika sudah kita kaji kembali 15 M ada minor dan fungsional nya teknis serba bisa. Kita kasih kembali 3 M ini. Dikarenakan meminimalisir temuan yang ada. Mungkin kedepan inisiatif butuh dana 15 M. Sekian dan Terima kasih
- Saifullah** : Untuk gedung yang masih dipakai, jangan sampai udah dibuat saat temuan tapi tidak terpakai gedung serba guna nya. Kegiatan yang diplotkan untuk pembuatan gedung serba guna sebenarnya di plotkan jangan sia-sia.
- Hasan Basri** : Anggaran yang diplotkan fungsional sejauh mana manfaatnya. Uang 15 M sangat besar, jangan sampai sia-sia.
- BPKK** : Yang terakhir pajak bagi hasil provinsi kembali ke dana desa 10 % 44 M, 3 post yang kita ambil Asumsinya, dana DOKA 7 M, terjadi penurunan drastis, total anggaran 89 M, jauh ditahun sebelumnya hampir 1 T Doka turun. Jangan terlalu jauh. Banyak yang ditutupi karena temuan kegiatan pegawai lainnya. Nah, kegiatan2 baru di ambil dari kegiatan lama yang tidak dikerjakan. Dan akan jadi kegiatan baru pada tahun kedepan.

Komposisi perkecamatan masih kurang, dari nomenklatur pun ada yang belum disebutkan didalamnya. Kami mohon izin waktu 1 atau 2 hari kemudian baru menyampaikan komposisi perkecamatan. Sekali lagi mohon maaf.

- Hasan Basri** : Komposisi perkecamatan, Merdu jangan dimasukkan lagi masalah perkantoran. Pemetaan kembali daerah mana masuk ke kecamatan. PAD masuk 19 hari. Asumsi kita masih ada potensi yang dikembangkan. Berapa potensi yang kita singgung PAD.
- A Kadir Jailani** : Janji tadi tambah lagi kegiatan yang sesuai, mana yang dirubah. Mana yang dimasukkan.
- Hasan Basri** : SKPK kita bahas secara global. Saya minta petunjuk, perlu ringkasan (resume).
- Heri Ahmadi** : Maunya dasar nya yang dibahas
- Mahlil** : Setiap dinas, adanya rekap perkegiatan, adanya resume perkegiatan.
- Syahrul Nurfa** : Semua kebaikan bersama bukan untuk pribadi, PAD dimana bersumbernya, ada potensi lain yang kita tambahkan. Misalnya 800 sekian dari sumber ini. Dinas PU kemana2 saja uang yang digunakan. Biasa dalam susunan anggaran, dimasukkan, ada yang dikurangi, ada yang dikeluarkan.
- Muslem** : Yang kita bahas, kita perlu kita bahas saja.
- Saifullah** : Yang kita pakai sekarang per dinas resume.
- Muslem** : Ini waktu kita memakan 4-5 hari, resume memudahkan kerja kita. Tidak mesti yang semua buku kita baca, Semua. Jadi pedoman saat memaksimalkan saat bekerja.
- Syahrul Nurfa** : Semua dibuat platform, apakah semua sesuai, terkadang ada perkecamatan ada kegiatan dan tidak ada. Ini pendapat saya.
- Akadir Jailani** : Jika sampai sekarang belum ada kesimpulan, kita akan skorkan rapat ini, kapan kita bahas kembali.
- Hasan Basri** : Jangan diskorkan dulu, saya masih ingin memberi saran. Tolong dana BLUD dan dana-dana lain

dibuat resume. Bayar ini itu dibuatkan secara rinci.

Syahrul Nurfa

: Jika malam ini ingin dibahas, kita bahas nanti malam.

BPKK

: Seperti saya paparkan tadi, masalah OPD, nanti bakal dibahas untuk apa, dan juga PAD.

Untuk tahun 2023 target 107 M menjadi 113 M, disini adanya penambahan, ini terjadi di JKM, dan 350 juta di dispora.

Target PAD mohon ijin kita tidak menambahkan lagi, mohon jangan di ubah untuk penambahan, karena di khawatirkan tidak akan mencukupi dana untuk pelunasan tahun ini. Ini saja maslah OPD, bsok kita akan bahas kembali

Akadir Jailani

: Terima kasih, saat ini rapat di skor. Dan rapat dilanjutkan besok jika tidak ada kendala apapun.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB